BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelompok Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Analisis pengaruh langsung ditujukan untuk melihat sejauh mana variabel eksogen secara determinan memengaruhi variabel endogen tanpa melalui perantara.

a. Karakteristik Kewirausahaan Sosial dan Maqasid Syariah: Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1) memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap Maqasid Syariah (M) dengan koefisien jalur tertinggi dalam model ini, yaitu 0,546 (p=0,000). Hal ini membuktikan bahwa jiwa sosial individu pengusaha merupakan basis utama internalisasi nilai-nilai kemaslahatan spiritual.
b. Peran Institusi HIPMI terhadap Ekosistem: Peran HIPMI (X2) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ekosistem (Y1) dengan koefisien 0,342 (p=0,000). Namun, ditemukan anomali di mana Peran HIPMI tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Kontribusi SDGs (p=0,270). Ini mengindikasikan bahwa peran organisasi bersifat fasilitatif, bukan eksekutor langsung dampak sosial.
c. Dukungan Eksternal terhadap Ekosistem dan SDGs: Penelitian ini menemukan bahwa Dukungan Eksternal (X3) merupakan pendorong paling kuat bagi terbentuknya Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,403 (p=0,000). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan akses sumber daya luar adalah fondasi utama ekosistem. Selain itu, dukungan eksternal juga berpengaruh langsung terhadap Kontribusi SDGs (Y2) sebesar 0,154, meskipun kekuatannya tidak sebesar pengaruhnya terhadap ekosistem.
d. Ekosistem terhadap SDGs dan Maqasid: Ekosistem (Y1) secara signifikan memengaruhi Kontribusi SDGs (Y2) sebesar 0,332 dan Maqasid Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

(M) sebesar 0,229. Ini menunjukkan bahwa ekosistem yang matang akan menciptakan iklim bisnis yang sesuai dengan kaidah syariah dan target pembangunan berkelanjutan.

e. Maqāṣid al-Sharīʿah (M) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi dalam pencapaian SDGs (Y2). Berdasarkan hasil pengujian statistik, hubungan ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,221 dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat, yakni nilai *P-Value* sebesar 0,001 (di bawah ambang batas 0,05). Hal ini membuktikan Maqāṣid al-Sharīʿah bukan sekadar konsep teoretis-spiritual, melainkan variabel praktis yang secara signifikan mengakselerasi kontribusi pengusaha HIPMI terhadap SDGs. Semakin tinggi kepatuhan pengusaha terhadap prinsip kemaslahatan, semakin besar dampak positif yang mereka berikan pada tujuan pembangunan berkelanjutan global.

2. Kelompok Pengaruh Mediasi (Indirect Effect)

Analisis mediasi mengungkapkan mekanisme bagaimana kontribusi SDGs tercipta melalui variabel perantara.

a. Ekosistem sebagai Mediator Struktural: Variabel Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) terbukti berperan sebagai mediator wajib (*full mediation*) bagi Peran HIPMI terhadap SDGs. Karena HIPMI tidak berpengaruh langsung ke SDGs, maka penguatan ekosistem adalah satu-satunya jalur bagi organisasi untuk memberikan dampak nyata pada SDGs (efek tidak langsung sebesar 0,114). Begitu pula dengan Dukungan Eksternal yang dampaknya meningkat melalui mediasi ekosistem (0,134).

b. Maqasid Syariah sebagai Mediator Nilai: Maqasid Syariah (M) secara signifikan memediasi pengaruh Karakteristik KS terhadap Kontribusi SDGs (efek tidak langsung sebesar 0,121). Temuan ini menjelaskan bahwa karakteristik individu tidak serta merta menjadi aksi SDGs tanpa adanya internalisasi nilai kemaslahatan (Maqasid).

c. Mediasi Berjenjang (*Sequential Mediation*): Terdapat alur mediasi berjenjang di mana faktor pendorong (X) membentuk ekosistem (Y1), yang kemudian diwarnai oleh nilai Maqasid (M), hingga akhirnya bermuara pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

capaian SDGs (Y2). Jalur ini memastikan kontribusi yang dihasilkan bersifat holistik, baik secara material maupun spiritual.

3. Kelompok Pengembangan Model (Novelty)

Sebagai puncak dari temuan penelitian, dikonstruksi sebuah model baru yang merepresentasikan orisinalitas disertasi ini.

a. *Islamic Social Entrepreneurship Ecosystem Model* (ISEEM): Penelitian ini merumuskan model ISEEM sebagai antitesis dari model ekosistem kewirausahaan konvensional. Model ini mengintegrasikan "Jalur Institusional" (HIPMI dan Dukungan Luar) dan "Jalur Spiritual" (Maqasid Syariah).
b. Keunikan Model: Kebaruan (*Novelty*) model ini terletak pada penempatan Maqasid Syariah sebagai variabel kunci yang menyelaraskan antara ambisi kewirausahaan dengan tanggung jawab ketuhanan (*Khalifah*). Model ISEEM membuktikan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs di lingkungan HIPMI sangat bergantung pada seberapa jauh ekosistem tersebut mampu menerjemahkan nilai-nilai *Maslahah* (kemaslahatan) ke dalam operasional bisnis.
c. Daya Prediksi Model: Kekuatan model ini ditunjukkan oleh nilai R-Square Kontribusi SDGs sebesar 0,886, yang berarti model ISEEM mampu menjelaskan 88,6% fenomena kontribusi SDGs anggota HIPMI, sebuah angka yang sangat kuat untuk sebuah model manajemen strategis baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan model ISEEM dan metodologi SEM-PLS yang digunakan, berikut adalah beberapa keterbatasan penelitian:

1. Keterbatasan Ruang Lingkup Geografis dan Organisasi (Scope Limitations)

Penelitian ini berfokus secara eksklusif pada anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Meskipun HIPMI adalah organisasi pengusaha muda terbesar, karakteristik anggotanya mungkin berbeda dengan pengusaha sosial di luar organisasi formal atau di organisasi lain seperti KADIN atau asosiasi UMKM

lainnya. Hal ini membatasi tingkat generalisasi hasil penelitian untuk seluruh populasi pengusaha sosial di Indonesia.

2. Penggunaan Data Melintang (Cross-Sectional Data)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross-sectional*, yaitu pengambilan data pada satu titik waktu tertentu. Mengingat Kontribusi SDGs (Y2) dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) adalah proses yang dinamis dan berjangka panjang, penelitian ini belum mampu memotret perubahan perilaku pengusaha secara longitudinal (dari waktu ke waktu).

3. Sifat Data Laporan Diri (Self-Reported Data)

Data dikumpulkan melalui kuesioner di mana responden menilai diri mereka sendiri (*perceived performance*), terutama pada variabel Maqasid Syariah (M) dan Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1). Hal ini berpotensi menimbulkan bias subjektivitas atau *social desirability bias*, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap "baik" secara norma sosial atau agama.

4. Kedalaman Variabel Maqasid Syariah

Meskipun penelitian ini berhasil mengintegrasikan Maqasid Syariah sebagai variabel mediasi, pengukuran yang digunakan masih berbasis pada persepsi umum pengusaha. Penelitian ini belum membedah secara mendalam komparasi antara kelima pilar Maqasid (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) secara parsial terhadap masing-masing 17 poin SDGs secara mendetail.

5. Keterbatasan Faktor Eksternal Lain

Model ISEEM dalam penelitian ini memiliki nilai *R-Square* yang sangat tinggi (0,886), namun masih terdapat 11,4% faktor lain di luar model yang memengaruhi kontribusi SDGs. Faktor-faktor seperti stabilitas makroekonomi, tingkat literasi digital, atau guncangan global (seperti pandemi atau krisis energi) belum dimasukkan secara eksplisit ke dalam model penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

C. Saran

Berdasarkan temuan signifikan dari model Islamic Social Entrepreneurship Ecosystem Model (ISEEM), saran penelitian diarahkan pada aspek kebijakan,

manajerial organisasi, dan pengembangan keilmuan. Berikut adalah penyusunan Saran Penelitian yang spesifik dan aplikatif:

1. Saran Praktis Bagi Institusi HIPMI

a. Institusionalisasi Model ISEEM: HIPMI disarankan untuk mentransformasi peran organisasi dari sekadar wadah jejaring bisnis menjadi *Social Entrepreneurship Hub*. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk unit khusus (misalnya: *HIPMI Islamic Social Business*) yang berfokus pada inkubasi bisnis berdampak sosial.

b. Penguatan Ekosistem Fungsional: Mengingat peran HIPMI tidak berpengaruh langsung ke SDGs melainkan harus melalui ekosistem, HIPMI harus menyediakan infrastruktur pendukung seperti mentor bisnis sosial, akses ke *impact investors*, dan standarisasi pelaporan dampak sosial bagi anggotanya.

c. Internalisasi Nilai Maqasid: HIPMI perlu mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah ke dalam kurikulum diklat daerah atau nasional. Hal ini bertujuan agar pengusaha muda tidak hanya mengejar profit, tetapi memiliki kompas etis dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam praktik bisnis mereka.

2. Saran Kebijakan Bagi Pemerintah (Dukungan Eksternal)

a. Regulasi Afirmatif bagi Kewirausahaan Sosial: Karena Dukungan Eksternal adalah pendorong terkuat ekosistem (0,403), pemerintah disarankan untuk memberikan insentif pajak atau kemudahan akses tender proyek publik bagi perusahaan rintisan pengusaha muda yang terbukti memiliki model bisnis berbasis kewirausahaan sosial.

b. Sinkronisasi Program SDGs dengan Ormas/Himpunan: Pemerintah perlu melibatkan organisasi strategis seperti HIPMI secara lebih sistemis dalam *Roadmap* pencapaian SDGs nasional, mengingat potensi pengusaha muda sebagai akselerator ekonomi dan sosial yang sangat masif.

3. Saran Akademis (Peneliti Selanjutnya)

a. Perluasan Locus Penelitian: Peneliti selanjutnya dapat menguji model ISEEM pada organisasi pengusaha lain atau di negara dengan karakteristik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Muslim minoritas untuk melihat apakah variabel Maqasid Syariah tetap menjadi mediator yang signifikan dalam budaya yang berbeda.

b. Penggunaan Metode Kualitatif (*Mixed Method*): Disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam (kualitatif) untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme internalisasi Maqasid Syariah dilakukan secara praktis dalam operasional harian perusahaan sosial milik anggota HIPMI.

c. Analisis Longitudinal: Mengingat SDGs memiliki target waktu (2030), penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat konsistensi kontribusi pengusaha muda terhadap SDGs dari waktu ke waktu.

D. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan orisinalitas, khususnya pada variabel Dukungan Eksternal yang menjadi pemicu terkuat ekosistem (0,403) dan peran Maqasid Syariah sebagai penggerak nilai, berikut adalah Rekomendasi Kebijakan (Policy Recommendations) yang strategis dan teknis:

1. Transformasi Regulasi Kewirausahaan Sosial (Skala Nasional)

a. Penyusunan RUU/Perpres Kewirausahaan Sosial: Pemerintah perlu menyusun payung hukum khusus yang mendefinisikan "Perusahaan Sosial" (*Social Enterprise*). Kebijakan ini harus memberikan status hukum yang jelas bagi anggota HIPMI yang menjalankan bisnis dengan misi sosial, agar mereka mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang berbeda dari korporasi murni.

b. Insentif Pajak Berbasis Dampak (*Impact-Based Tax Incentive*): Mengingat dukungan eksternal sangat krusial, pemerintah direkomendasikan memberikan pengurangan pajak (*tax deductible*) bagi pengusaha muda yang mampu membuktikan kontribusi bisnisnya terhadap poin-poin SDGs (misalnya pengentasan kemiskinan atau pelestarian lingkungan).

2. Kebijakan Akses Permodalan Berbasis Syariah (Sektor Keuangan)

a. Skema Pembiayaan *Social Impact Fund*: Mendorong perbankan syariah dan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan khusus bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

lulusan inkubasi HIPMI yang berbasis Maqasid Syariah. Pembiayaan ini tidak hanya melihat *credit scoring* konvensional, tetapi juga *social impact scoring*.

b. Integrasi Dana ZISWAF untuk *Seed Funding*: Mengusulkan kebijakan sinkronisasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan HIPMI untuk menyalurkan dana zakat produktif atau wakaf tunai sebagai modal awal (*seed funding*) bagi wirausaha sosial pemula di kalangan pemuda.

3. Kebijakan Pengadaan Publik Afirmatif (Affirmative Public Procurement)

Kuota Tender untuk Wirausaha Sosial: Pemerintah (melalui LKPP) dapat mengeluarkan kebijakan yang memberikan kuota khusus atau poin tambahan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi perusahaan yang memiliki sertifikasi "Wirausaha Sosial" dari organisasi profesi seperti HIPMI. Ini akan memperkuat Ekosistem Kewirausahaan Sosial melalui jaminan pasar.

4. Kebijakan Pendidikan dan Inkubasi Terintegrasi

Kurikulum Kewirausahaan Berbasis Maqasid: Kementerian Pendidikan dan Kemenpora dapat berkolaborasi dengan HIPMI untuk menyusun standar kurikulum pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya mengajarkan cara mencari profit, tetapi juga internalisasi Maqasid Syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai fondasi bisnis berkelanjutan.

5. Rekomendasi Khusus untuk Internal Organisasi (HIPMI)

a. Pembentukan *Social Entrepreneurship Desk*: Membuat kebijakan internal di tingkap BPP (Pusat) hingga BPC (Cabang) untuk wajib memiliki bidang khusus yang mengurusi pengembangan ekosistem bisnis sosial.

b. Sertifikasi Maqasid-SDGs: HIPMI dapat menerbitkan sertifikasi bagi anggotanya yang model bisnisnya telah terverifikasi selaras dengan model ISEEM. Sertifikat ini dapat digunakan anggota sebagai *leverage* untuk menarik investor global yang fokus pada ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN